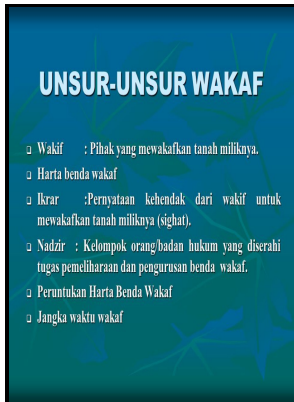


Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional

Tatanusa - Ke Arah Mana Politik Hukum Agraria Nasional Kita?



Description: Registration and management of waqf land according to agrarian law in Indonesia.

-

Water resources development -- Soviet Union.

School buildings -- United States.

Astrology -- Early works to 1800.

English poetry

Waqf -- Indonesia.

Land tenure -- Law and legislation -- Indonesia. Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional

-Perwakafan tanah dalam politik hukum agraria nasional

Notes: Includes bibliographical references (p. 219-227).

This edition was published in 2003



Filesize: 54.51 MB

Tags: #Hukum #agraria

POLITIK HUKUM AGRARIA

Konsepsi Hukum Agraria Setidaknya ada lima kelompok yang membedakan tentang hukum agraria di Indonesia. Sementara itu, sifat religius konsepsi hukum tanah nasional terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria

Ini menggambarkan bahwa UUPA tidak dijalankan oleh pemerintahan Indonesia dari zaman ke zaman. Hal ini sesuai dengan konsep kewenangan pertanahan yang pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketentuan lain yang menyangkut pemakaian tanah-tanah milik warga negara Belanda yang kembali ke negerinya.

ALAKAZAM...: Hukum Agraria (Perwakafan Tanah)

Pada masa penjajahan Jepang, tidak ada peraturan tentang wakaf yang dikeluarkan, maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda masih tetap berlaku.

Hukum agraria

Pengertian Hukum Agraria Menurut Para Ahli menyatakan bahwa Hukum agraria ialah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak milik individu telah mengalami perkembangan yang pesat.

Tanah Wakaf

Dengan demikian pengaturan tentang hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum unifikasi hukum yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat lihat Pasal 5 UUPA.

POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat 2, meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Memahami Hukum: POLITIK HUKUM AGRARIA

Utrecht SH, Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

Tanah Wakaf

Tetapi sejauh itu masalah penguasaan tanah secara formal belum memperoleh perhatian sepenuhnya. Semangat UUPA adalah pertimbangan corak kehidupan mayoritas rakyat yang ekonominya bersifat agraris.

Related Books

- [Our untold stories - a collection of family history narratives](#)
- [Windfisch - Erzählung](#)
- [Cámara Oficial de Comercio e Industria, Córdoba, 1950-1954 - Rafael de La-Hoz y José María García de](#)
- [LDS;Fine Lines Pr Smith R](#)
- [Best of Britains countryside - northern England and Scotland : a driving & walking itinerary](#)